

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kubu Raya merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 6.985,20 km² dan jumlah penduduk 522.174 jiwa. Setiap masyarakat Kabupaten Kubu Raya memerlukan fasilitas pelayanan publik dalam membuat dokumen administrasi kependudukan ataupun dokumen perizinan dan lainnya. Berbagai masalah dalam administrasi yang dikoordinasikan oleh otoritas publik seperti banyaknya fasilitas pelayanan publik yang saling terkait namun tidak berada dalam satu lokasi yang sama, sehingga masyarakat harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak tertentu ketika mengurus dokumen yang saling terkait. Hal tersebut tidak efisien dalam penggunaan waktu maupun kepuasan masyarakat. Maka dari itu perlu disediakan sebuah tempat yang menggabungkan berbagai jenis layanan publik dalam satu tempat atau lokasi yang sama atau berdekatan. Dalam hal ini dapat dibangun sebuah Mal Pelayanan Publik,

Struktur dasar yang harus diwujudkan dalam suatu hasil yang terletak dan bereaksi terhadap kebutuhan esensial daerah setempat sehingga lahirlah Pelayanan Publik Terpadu yang kemudian berkembang menjadi Mal Pelayanan Publik yang lebih moderat yang mengkonsolidasikan administrasi dari pemerintah pusat, legislatif provinsi, BUMD dan swasta.

Adapun yang dimaksud dengan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 adalah selesainya latihan menawarkan jenis bantuan kepada masyarakat untuk produk, administrasi yang berpotensi manajerial yang merupakan pengembangan kapasitas administrasi berbadan hukum baik setengah jalan dan lokal seperti administrasi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta untuk memberikan administrasi yang cepat, sederhana, wajar, terlindungi dan menyenangkan. Alasan keberadaan Mal Pelayanan Publik adalah untuk memberikan kenyamanan, kecepatan, kewajaran, keamanan dan akomodasi yang efisien kepada masyarakat dalam mendapatkan administrasi.

Mal Pelayanan Publik dikoordinir oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan kewajiban dan kapasitas di bidang spekulasi dan administrasi. Luasnya Mal Pelayanan Publik mencakup semua administrasi perizinan apalagi non-otorisasi di bawah kekuasaan Pemerintah Pusat dan Daerah, Penggabungan pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Benda Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Swasta ini untuk mengingat pemanfaatan penggunaan ruangan dalam struktur yayasan/kantor dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan setiap organisasi yang menawarkan jenis bantuan untuk membantu dalam Mal Pelayanan Publik dengan syarat telah disetujui oleh masing-masing pihak sesuai dengan pengaturan peraturan yang diterapkan oleh pemerintahan setempat.

Berdasarkan latar belakang diatas perancangan ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip rancangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya yang merupakan salah satu fasilitas umum yang patut disipergunakan masyarakat dengan sebaik mungkin. Untuk melihat tingkat efisiensi tersebut, perlu diadakan tinjauan terhadap pemerintah daerah guna mengevaluasi kepuasan masyarakat sebagai kelompok kesatuan utuh dengan memerhatikan berbagai aspek.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah pada perancangan ini yaitu “Bagaimana merancang Mal Pelayanan Publik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya?”.

1.3. Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini adalah “Merancang Mal Pelayanan Publik yang berada di Kabupaten Kubu Raya”.

1.4. Sasaran

Sasaran yang harus dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Mengidentifikasi teori tentang mall pelayanan publik,
2. Mengidentifikasi studi kasus tentang mall pelayanan publik,
3. Mengidentifikasi lokasi perancangan,
4. Merumuskan konsep-konsep perancangan.
5. Merumuskan konsep internal yang mengelompokkan kegiatan, pelaku, kebutuhan ruang, besaran ruang, pola hubungan ruang dan organisasi ruang serta persyaratan ruang yang ada pada perancangan Pasar Rakyat.
6. Merumuskan konsep tapak atau arsitektur lingkungan yang mengkaji mengenai pemilihan tapak, Zoning, sirkulasi, organisasi dan vegetasi pada perancangan Pasar Rakyat.
7. Menghasilkan gambar masterplan, pra-rancangan dan gambar kerja.

1.5. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam hal ini mencakup pada pembahasan secara mendasar tentang mal pelayanan publik, fungsi kegiatan yang di wadahi, fasilitas-fasilitas penunjang yang disesuaikan pada perancangan mal pelayanan publik.

1.6. Metode Perancangan

Metode perancangan adalah alat untuk mengetahui sesuatu melalui tahapan-tahapan yang sistematis.

1.6.1 Keaslian perancangan (fungsi, metode dan lokasi)

Keaslian pada sebuah perencanaan diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara perancangan sebelumnya dengan perancangan yang dilakukan. Sepengetahuan penulis, Perencanaan Kawasan Pariwisata dan Resort di Pantai Padang Tikar belum pernah dilakukan pada perencanaan dan perancangan sebelumnya. Perancangan ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi perencanaan dan perancangan sejenis sebelumnya, sehingga keaslian perancangan ini dapat dijaga

1.6.2 Pendekatan perancangan

Pendekatan program dasar perencanaan dan perancangan arsitektur merupakan sebuah usaha untuk melakukan pendekatan pada acuan perancangan dan perencanaan dan diharapkan perencanaan Mal Pelayanan Publik di Kubu Raya layak dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan Mal Pelayanan Publik. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah:

Pendekatan aspek fungsional yang merupakan perincian apa saja dan siapa saja pelaku di kawasan tersebut sehingga dapat menentukan fasilitas yang digunakan dalam Mal Pelayanan Publik.

Pendekatan aspek kinerja, yaitu menganalisis utilitas bangunan yang menunjang kinerja dari kawasan dan bangunan dalam memenuhi kebutuhan fungsi ruangnya. Aspek ini bertujuan untuk mencapai unsur kenyamanan dan kemudahan dalam kawasan tersebut.

Pendekatan aspek teknis, yaitu berkaitan dengan teknis pembangunan seperti menganalisis struktur dan bahan yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kelayakan dalam kawasan tersebut.

Pendekatan aspek arsitektural, yang memiliki kaitan dengan konsep kawasan dan bangunan yang digunakan dalam perancangan.

1.6.3 Metode perancangan

a. Objek perancangan

Objek perancangan adalah Mal Pelayanan Publik yang merupakan tempat pelayanan publik yang berlokasi di Kubu Raya. Mal Pelayanan Publik ini guna menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu belum memiliki Mal Pelayanan Publik sedangkan daerah tersebut memiliki permasalahan dalam efisiensi waktu dan tenaga masyarakat karena lokasi pelayanan yang tidak berada dalam satu tempat.

b. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada perancangan ini adalah data primer dan data skunder.

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan survey, observasi dan wawancara.

Data Sekunder adalah data yang didapat dengan cara tidak langsung. Data ini diperoleh dari informasi yang sudah ada melalui catatan buku, jurnal atau arsip lainnya. Data skunder berbentuk data-data yang sudah tersusun seperti data kependudukan, data peraturan-peraturan, dan literatur yang terkait dengan Mal Pelayanan Publik di Kubu Raya.

c. Teknik Analisis

Teknik analisis data pada perancangan ini yaitu dengan mengurutkan atau mengelompokkan data-data yang telah di dapat. Teknis analisis yang digunakan pada perancangan ini yaitu teknik analisis kualitatif. Data-data yang telah didapat disusun dan dikelompokkan kemudian menelaah atau mempelajari seluruh data yang tersedia untuk mendapatkan kesimpulan agar dapat digunakan untuk perancangan Mal Pelayanan Publik di Kubu Raya.

Data-data yang dianalisis pada perancangan ini meliputi data-data berikut, yaitu:

Analisis fungsi, yaitu yang berkaitan dengan tujuan rancangan yang menentukan kebutuhan ruang, standar ruang dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam perancangan. Analisis program ruang yaitu untuk menentukan dan membuat hubungan ruang, organisasi ruang, zonasi ruang dan wilayah, analisa tapak, analisa utilitas dan struktur dan konsep-konsep dalam penataan ruang.

Analisa pelaku, menganalisa pengguna atau pemakai fungsi bangunan yang berkaitan dengan bidang pelayanan publik. Menganalisis pelaku pelayanan publik, pelaku penerima layanan publik, serta pelaku dalam kepengurusan.

Analisa ruang, analisa ini meliputi analisa kebutuhan ruang, persyaratan ruang, hubungan ruang, organisasi ruang serta besaran ruang.

Analisa lokasi, dengan mengolah data eksternal yang sudah ada untuk menentukan konsep wilayah atau tata ruang luar dan kebutuhan fasilitas yang diperlukan dalam Mal Pelayanan Publik dengan melihat potensi yang ada pada wilayah perancangan.

Analisa tapak, analisa ini bertujuan untuk menghasilkan alternatif desain dengan menganalisis tapak. Seperti mengidentifikasi bentuk tapak, menentukan peletakan bangunan, menentukan arah orientasi bangunan, sirkulasi bangunan, vegetasi serta pengelompokkan zona ruang.

Analisa bentuk, membentuk bentukan massa bangunan yang sesuai dengan kondisi tapak dan kebutuhan secara fungsi maupun kebutuhan lainnya.

Analisa struktur, mempertimbangkan struktur bangunan yang sesuai dengan fungsi bangunan, bentuk dan kekuatan.

Analisa Utilitas, melakukan pertimbangan terkait rencana utilitas pendukung fungsi pada bangunan.

Analisa fisika bangunan, mempertimbangkan masalah arsitektur lingkungan yang mempengaruhi bangunan terhadap kenyamanan pelaku pada bangunan dari sisi pencahayaan, penghawaan dan akustika.

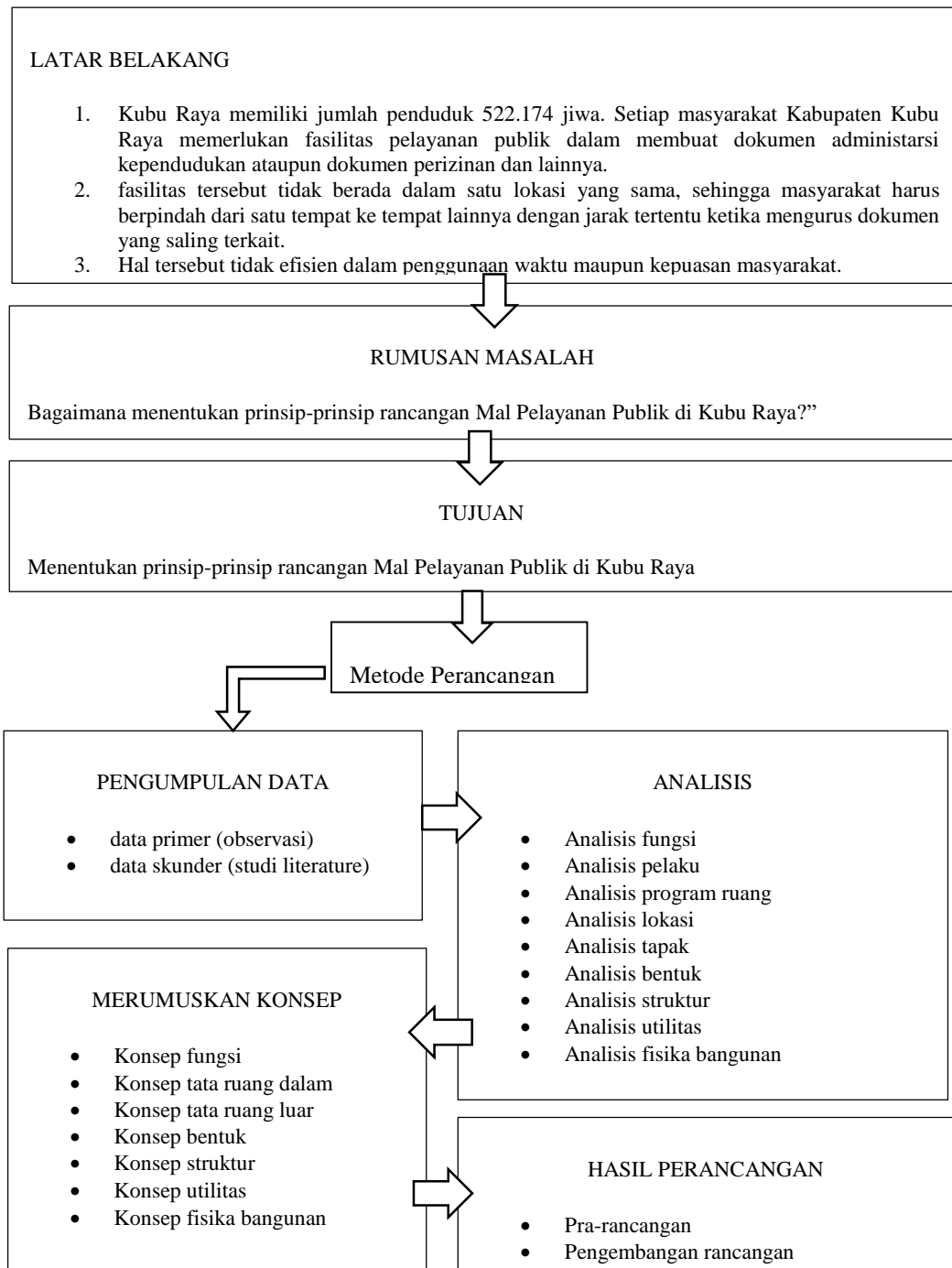
d. Tahapan Perancangan

Tahapan perancangan mencakup langkah-langkah pelaksanaan perancangan. Tahapan perancangan yang digunakan yaitu tahap prarancangan dan tahap pengembangan.

Tahap prarancangan, meliputi proposal perancangan, meliputi gambar kerja berupa gambar situasi, site plan, tampak, denah, potongan dan perspektif.

Tahap pengembangan, yang terdiri dari tiga jenis yaitu, rencana arsitektural meliputi gambar rencana dan detail Mal Pelayanan Publik, struktural meliputi gambar-gambar rencana struktur Mal Pelayanan Publik yang digunakan dalam perancangan, dan utilitas yang meliputi gambar-gambar rencana utilitas Mal Pelayanan Publik yang digunakan dalam perancangan

1.6.4 Diagram Alir Perancangan



1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Sistematika tersebut untuk memudahkan memahami perancangan ini, yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang dasar atau titik tolak mengenai apa yang di rancang. Pada bab ini juga menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai mall pelayanan publik berdasarkan studi literatur dan studi preseden terhadap perencanaan dan perancangan sejenis yang memiliki fungsi sebagai fasilitas pelayanan publik.

BAB III LANDASAN KONSEPTUAL

Pada bab ini menjelaskan analisis

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN

Pada bab ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip perancangan mall pelayanan publik berupa pemaparan tentang studi kasus dan analisa studi kasus dengan mengkomparasi antara studi kasus satu dan lainnya untuk menghasilkan prinsip-prinsip rancangan yang dapat digunakan dalam perancangan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya.

BAB V PRA RANCANGAN

Pada bab ini merupakan hasil pra rancangan menampilkan hasil pra rancangan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya.